Dinamis: Jurnal Inovasi dan Transformasi Pendidikan
Volume: 1, Nomor: 4, (2026), Desember: 1363 - 1381
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Dinamis/article/view/587
E-ISSN: 3124-8926

REKONSTRUKSI PARADIGMA PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: TINJAUAN HISTORIS-PERIODIK DAN LANDASAN ETIS SIRAH NABAWIYAH

Dian Pebrianti[1], Hesty Sulfaidah[2], Idrus L.[3]
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: *dianpebrianti172@gmail.com[1*]*, *hestysulfaidah@gmail.com[2]*, *idruslatif.iainbone@gmail.com[3]*

Info Artikel
Received: *28 September 2026*
Revised : *10 Oktober 2026*
Accepted: *29 Oktober 2026*
Published: *08 November 2026*

Keywords: *historical periodization, Islamic education renewal, madrasah, modernization, pesantren, sirah nabawiyah.*

Abstract
This article examines the period of Islamic education renewal in Indonesia by combining a conceptual review, historical periodization, a mapping of renewal models, and the normative foundation drawn from the prophetic biography (sirah nabawiyah). The study employs a qualitative library research design with content analysis of accredited national journals, reputable international journals, academic books, and sirah books. The findings show that the renewal of Islamic education was not a single event but a series of responses to the pressures of each era, unfolding in five phases: the traditional phase, the early twentieth-century awakening, post-independence integration, equalization during the New Order, and the reform-digital transformation. Renewal operates in six dimensions: aims, curriculum, methods, institutions, management, and educators. The sirah supplies principles that keep renewal on course: firmness in revealed values, flexibility in method, exemplary educators, and learning centers open to society. The article recommends an integrative, moderate, and technology-adaptive paradigm of renewal that preserves Islamic identity.

Kata Kunci*:* madrasah, modernisasi, pembaharuan pendidikan Islam, periodisasi historis, pesantren, sirah nabawiyah.

Abstrak
Artikel ini menelaah masa pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia dengan memadukan tinjauan konseptual, periodisasi historis, pemetaan model pembaruan, dan landasan normatif dari sirah nabawiyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berjenis studi kepustakaan dengan analisis isi terhadap jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, buku akademik, dan buku sirah nabawiyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembaharuan pendidikan Islam bukan proses tunggal, melainkan rangkaian respons terhadap tekanan zaman yang berlangsung dalam lima fase: tradisional, kebangkitan awal abad ke-20, integrasi pascakemerdekaan, penyetaraan pada masa Orde Baru, dan transformasi era reformasi-digital. Pembaruan bergerak pada enam dimensi, yaitu tujuan, kurikulum, metode, kelembagaan, manajemen, dan pendidik. Sirah nabawiyah memberi prinsip yang menjaga arah pembaruan: keteguhan pada nilai wahyu, keluwesan metode, keteladanan pendidik, serta pusat pembelajaran yang terbuka bagi masyarakat. Artikel merekomendasikan paradigma pembaruan yang bersifat integratif, moderat, dan adaptif terhadap teknologi tanpa melepaskan identitas keislaman.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Nusantara tidak lahir dalam ruang kosong. Jauh sebelum sistem persekolahan modern diperkenalkan, masyarakat Muslim telah mengenal pengajian di rumah guru, surau, langgar, dan masjid, yang kemudian berkembang menjadi pesantren, madrasah, sekolah Islam, hingga perguruan tinggi (Nata, 2019). Lembaga-lembaga tersebut melahirkan ulama, tokoh masyarakat, dan pemimpin bangsa, sekaligus menjadi benteng identitas keagamaan di tengah tekanan kekuasaan kolonial. Namun, perjalanan panjang itu tidak selalu mulus. Pada titik tertentu sistem yang semula efektif mulai terasa tertinggal ketika berhadapan dengan sekolah-sekolah modern, perubahan struktur ekonomi, dan arus gagasan baru dari luar negeri.

Dari situlah muncul apa yang lazim disebut masa pembaharuan pendidikan Islam. Istilah ini merujuk pada rentang waktu ketika para tokoh, organisasi, dan pemerintah secara sadar menata ulang tujuan, kurikulum, metode, dan kelembagaan pendidikan Islam agar tetap bermakna bagi zamannya. Gagasan pembaruan itu tidak tumbuh secara lokal semata. Pemikiran pembaharuan yang bergulir di Turki, Mesir, dan India sejak abad ke-19 ikut membentuk cara pandang kaum Muslim terhadap pendidikan (Nasution, 1975), lalu masuk ke Nusantara melalui jemaah haji, pelajar yang menuntut ilmu di Timur Tengah, serta bacaan berkala yang beredar luas (Azra, 2012).

Kajian mengenai tema ini cukup banyak, tetapi sebagian besar terpisah menurut tokoh atau organisasi. Tinjauan Tarigan et al. (2024) merangkum konsep pembaruan, latar belakangnya pada abad ke-19 dan ke-20, serta pengaruhnya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Munawir dan Novita (2023) menyoroti kontribusi satu abad Nahdlatul Ulama dalam memodernisasi pendidikan Islam, sedangkan Mujahid (2023) menelaah peralihan pendidikan NU dari pendekatan religius-konservatif menuju konsep religius-rasional-sosiologis. Karya-karya klasik seperti Steenbrink (1986) dan Dhofier (2011) memberi gambaran mendalam tentang pesantren, madrasah, dan sekolah dalam kurun modern. Meski demikian, jarang ada kajian yang menautkan periodisasi pembaharuan dengan rujukan normatif yang paling dasar bagi pendidikan Islam, yakni praktik pendidikan pada masa Nabi Muhammad saw. sebagaimana terekam dalam literatur sirah.

Celah itulah yang hendak diisi artikel ini. Pembaharuan yang tidak berpijak pada nilai dasar berisiko menjadi sekadar peniruan terhadap model pendidikan lain, sementara kesetiaan pada tradisi yang tidak disertai kemauan berubah berisiko membuat lembaga kehilangan daya tanggap. Sirah

nabawiyah dapat berfungsi sebagai jangkar, sebab ia memperlihatkan bagaimana pendidikan dijalankan dengan prinsip yang tetap sekaligus cara yang lentur. Sirah nabawiyah difungsikan bukan untuk menarik romantisisme historis secara anakronistis, melainkan sebagai kompas aksiologis profetik (prophetic ethics) guna menyeimbangkan tuntutan adaptasi teknologi dan pasar dengan pembinaan integritas adab peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berupaya menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana konsep pembaharuan pendidikan Islam dipahami dan dibedakan dari istilah yang berdekatan. Kedua, bagaimana fase-fase pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia berlangsung beserta model dan dimensi yang menyertainya. Ketiga, prinsip apa dari sirah nabawiyah yang dapat dijadikan landasan untuk merekonstruksi arah pembaruan pada masa kini. Tujuannya adalah menyusun sintesis yang ringkas, runtut, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik bagi mahasiswa, pendidik, dan pengelola lembaga pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa gagasan, peristiwa sejarah, dan konsep yang telah terdokumentasi dalam literatur, bukan data lapangan yang menuntut pengamatan langsung. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti menelusuri perkembangan gagasan secara kronologis sekaligus membandingkan sudut pandang antarpenulis.

Sumber data dihimpun dari pangkalan data akademik Google Scholar, Portal Garuda, dan Moraref dengan kata kunci kombinatif: “pembaharuan pendidikan Islam Indonesia”, “modernisasi madrasah”, “tipologi pesantren modern”, dan “sirah nabawiyah dalam pendidikan”. Literatur yang disaring meliputi artikel jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, buku akademik dan risalah sejarah klasik (Steenbrink, 1986; Dhofier, 2011), serta karya kontemporer sirah nabawiyah terbitan sepuluh tahun terakhir.

Status akreditasi jurnal diperiksa pada laman resmi masing-masing jurnal, sedangkan metadata artikel dan buku, seperti tahun, volume, halaman, penerbit, dan tautan, dicatat dari halaman penerbitan resminya.

Analisis data mengikuti tiga langkah. Peneliti pertama-tama membaca sumber secara berulang untuk memperoleh gambaran umum, kemudian mengelompokkan temuan ke dalam kategori konsep, fase sejarah, tokoh dan model, dimensi pembaruan, serta prinsip sirah. Tahap terakhir adalah sintesis, yakni menghubungkan kategori-kategori tersebut menjadi satu kerangka argumentasi. Keabsahan

temuan dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan dari jurnal, buku akademik, dan literatur sirah, serta dengan menyebutkan secara terbuka bagian yang bersandar pada satu sumber saja. Keterbatasan penelitian ini terletak pada tidak dilibatkannya data lapangan, sehingga temuan bersifat konseptual-historis dan perlu diuji lebih jauh dalam studi empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembaharuan Pendidikan Islam

Dalam khazanah Islam dikenal beberapa istilah yang beririsan, yakni *tajdid* (memperbarui), *ishlah* (memperbaiki), modernisasi, dan reformasi. Keempatnya sering dipakai bergantian, padahal masing-masing membawa penekanan yang berbeda. *Tajdid* menekankan upaya menghidupkan kembali ajaran agar kembali segar dan bersih dari tambahan yang tidak berasal dari sumbernya. *Ishlah* menekankan perbaikan atas keadaan yang rusak atau timpang. Modernisasi lebih menunjuk pada penyesuaian terhadap kemajuan ilmu dan teknologi, sedangkan reformasi menekankan perubahan struktural yang cukup mendasar.

Harun Nasution (1975) memaknai pembaharuan sebagai gerakan dan pikiran yang berusaha mengubah paham, adat, serta kelembagaan lama supaya selaras dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pengertian ini penting karena menunjukkan dua sisi sekaligus: ada unsur kritik terhadap keadaan lama, dan ada unsur penyesuaian terhadap keadaan baru. Dalam bidang pendidikan, Nata (2019) memandang pembaruan sebagai rangkaian gagasan, pemikiran, upaya, dan strategi untuk memperbaiki pendidikan Islam sehingga mampu menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, pembaruan tidak berhenti pada pergantian kurikulum atau pembangunan gedung, tetapi menyentuh cara berpikir tentang apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya.

Tarigan et al. (2024) menegaskan bahwa pembaruan pendidikan Islam di Indonesia adalah upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat identitas keislaman, dan menyiapkan generasi yang siap bersaing secara global. Rumusan itu sejalan dengan pandangan bahwa pembaruan tidak identik dengan meninggalkan agama. Yang diperbarui adalah cara memahami, mengelola, dan menyampaikan pendidikan, sedangkan nilai dasar yang bersumber dari wahyu tetap menjadi poros. Pembedaan ini membantu menghindari dua kekeliruan yang sering muncul, yaitu menganggap setiap perubahan sebagai ancaman terhadap agama, atau sebaliknya menganggap setiap kebaruan pasti lebih baik daripada warisan lama.

Pemahaman tentang pembaruan juga perlu ditempatkan pada sebuah spektrum. Pada satu ujung

terdapat sikap yang menolak hampir semua perubahan dengan alasan menjaga kemurnian warisan, sedangkan pada ujung lain terdapat sikap yang menerima hampir semua gagasan baru tanpa saringan. Sebagian besar upaya pembaruan yang berhasil berada di antara keduanya, yaitu mempertahankan hal-hal yang masih bermanfaat dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Kecenderungan tengah inilah yang sering diringkas dalam kaidah populer di lingkungan pesantren, yakni memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Kaidah tersebut tidak menyelesaikan semua perbedaan, tetapi menyediakan bahasa bersama untuk berdiskusi tentang apa yang perlu dijaga dan apa yang perlu diganti (Nata, 2019).

Sirah Nabawiyah sebagai Fondasi Normatif Pembaruan

Pembicaraan tentang pembaharuan pendidikan Islam seharusnya dimulai dari pertanyaan mengenai apa yang hendak dipertahankan. Jawabannya dapat ditelusuri dari praktik pendidikan pada masa Nabi Muhammad saw. Literatur sirah menggambarkan bahwa pendidikan bermula dari wahyu pertama yang memerintahkan membaca, sehingga sejak awal proses belajar diletakkan sebagai inti risalah (Al-Mubarakfuri, 2019). Perintah itu bukan sekadar seruan untuk mengeja huruf, tetapi pembukaan sebuah tradisi yang menempatkan ilmu, pena, dan pengajaran sebagai bagian dari relasi manusia dengan Penciptanya.

Pada periode Makkah, pendidikan dijalankan secara bertahap dan tertutup. Kajian sirah mencatat pembinaan para sahabat awal di rumah Al-Arqam bin Abi al-Arqam sebagai pusat pertemuan, tempat wahyu dibacakan, akidah ditanamkan, dan akhlak dibentuk dalam suasana kekeluargaan (Farid, 2018; Ibnu Hazm, 2018). Ciri yang menonjol dari fase ini adalah ketekunan membina kualitas pribadi sebelum membangun struktur yang besar. Murid tidak hanya diajari apa yang harus diketahui, tetapi dilatih bersabar menghadapi tekanan, menjaga rahasia, dan teguh pada keyakinan.

Pada periode Madinah, pusat pembelajaran berpindah ke ruang yang terbuka. Masjid berfungsi bukan hanya sebagai tempat salat, tetapi juga sebagai ruang musyawarah, pengajaran, dan pelayanan sosial. Riwayat sirah menyebut adanya sekelompok sahabat yang tinggal di serambi masjid dan mencurahkan waktunya untuk belajar, yang dikenal sebagai ahlus suffah (Al-Mubarakfuri, 2019). Sirah juga mencatat langkah-langkah yang bersifat kelembagaan, seperti pengiriman Mus‘ab bin ‘Umair ke Madinah untuk mengajarkan Al-Qur’an sebelum hijrah, dan penyusunan kesepakatan bersama yang mengatur kehidupan masyarakat majemuk di Madinah (Farid, 2018). Dari sini tampak bahwa pendidikan pada masa Nabi tidak terlepas dari pembangunan masyarakat.

Sebagian riwayat sirah juga menyebut bahwa sejumlah tawanan Perang Badar yang pandai baca-tulis dapat menebus kebebasannya dengan mengajarkan kemampuan itu kepada anak-anak kaum Muslim. Terlepas dari perbedaan rincian riwayat, peristiwa ini sering dipakai sebagai contoh bahwa Nabi memandang keterampilan literasi sebagai kepentingan umum yang layak diprioritaskan, bahkan dengan memanfaatkan keahlian dari pihak yang semula berseberangan (Al-Mubarakfuri, 2019). Dalam konteks pembaruan, contoh ini mengajarkan keterbukaan terhadap sumber keahlian dari mana pun, selama tujuan pendidikan tetap terjaga.

Dari sisi metode, sirah memperlihatkan keragaman cara mengajar. Nabi menggunakan keteladanan, dialog, pertanyaan yang memancing berpikir, perumpamaan, kisah, serta pembiasaan dalam ibadah dan muamalah. Beliau menyesuaikan penyampaian dengan kemampuan dan keadaan penerima, sehingga seorang sahabat dapat memperoleh jawaban berbeda atas pertanyaan yang tampak sama (Ibnu Hazm, 2018). Keluwesan ini menunjukkan bahwa yang tetap adalah tujuan dan nilai, sedangkan teknik penyampaian terbuka untuk disesuaikan. Prinsip itulah yang menjadi pintu masuk bagi pembaruan metode pada setiap zaman.

Peristiwa hijrah dapat pula dibaca sebagai bentuk pembaruan sistemik. Perpindahan dari Makkah ke Madinah bukan sekadar pindah tempat, tetapi penataan ulang seluruh ekosistem dakwah dan pendidikan: pusat kegiatan dibangun, hubungan antarkelompok diatur, dan tanggung jawab sosial dibagi. Pada saat yang sama, inti ajaran tidak berubah sedikit pun. Yang berubah adalah strategi, struktur, dan sarana yang dipakai untuk menjalankan ajaran itu dalam keadaan yang baru (Al-Mubarakfuri, 2019; Ibnu Hazm, 2018). Pelajaran ini penting bagi pengelola lembaga pendidikan, sebab ia menunjukkan bahwa perubahan struktur yang berani dapat berjalan seiring dengan keteguhan prinsip.

Dengan demikian, sirah nabawiyah memberi setidaknya empat pegangan bagi pembaruan. Pertama, ilmu berakar pada wahyu dan diarahkan pada pembentukan manusia yang beriman dan berakhlak. Kedua, metode dapat beragam sepanjang tidak menyalahi tujuan. Ketiga, pendidik harus menjadi teladan, bukan hanya penyampai materi. Keempat, pusat pembelajaran perlu hidup di tengah masyarakat dan melayani kebutuhan mereka. Empat pegangan ini akan dipakai sebagai kacamata untuk membaca fase-fase pembaharuan pada bagian berikut dan sebagai dasar rekonstruksi pada bagian akhir.

Latar Belakang Global Gerakan Pembaharuan

Gerakan pembaruan pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika dunia

Islam pada abad ke-19. Nasution (1975) menguraikan bahwa persentuhan dengan Eropa, terutama setelah kemunduran politik dan militer kekhalifahan, mendorong sebagian penguasa dan pemikir Muslim mencari sebab ketertinggalan dan jalan keluarnya. Di Turki Usmani, upaya penataan negara diikuti dengan pembukaan sekolah-sekolah gaya baru untuk menyiapkan tenaga militer, administrasi, dan teknik. Di Mesir, penguasa membuka lembaga pendidikan dan mengirim pelajar ke Eropa, sementara pemikir seperti Muhammad Abduh mengajukan gagasan agar pendidikan agama dibersihkan dari kejumudan dan dipadukan dengan ilmu pengetahuan modern. Di India, Sayyid Ahmad Khan mendirikan lembaga pendidikan yang berupaya menyandingkan ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan Barat.

Gagasan-gagasan tersebut sampai ke Nusantara melalui jalur yang beragam. Ulama dan pelajar Nusantara yang bermukim di Makkah dan Kairo membawa pulang bacaan dan cara pandang baru, sedangkan majalah dan buku berbahasa Arab dan Melayu menyebarkannya lebih luas (Azra, 2012). Steenbrink (1986) mencatat bahwa pada saat yang sama masyarakat Muslim menyaksikan sekolah-sekolah pemerintah kolonial yang menawarkan jenjang kerja dan status sosial, sehingga lembaga tradisional merasakan dorongan untuk berbenah. Dengan kata lain, pembaruan di Indonesia lahir dari pertemuan dua tekanan: tekanan intelektual dari dunia Islam dan tekanan struktural dari sistem pendidikan kolonial.

Penting untuk dicatat bahwa penerimaan terhadap gagasan pembaruan tidak seragam. Sebagian kalangan menyambutnya sebagai jalan keluar, sebagian lain mencurigainya sebagai jalan masuk bagi pengaruh asing. Perbedaan sikap ini kelak melahirkan variasi model pembaruan di lapangan, mulai dari yang mengubah kelembagaan secara cepat hingga yang memilih perubahan bertahap sambil menjaga tradisi keilmuan lama (Dhofier, 2011; Nata, 2019).

Periodisasi Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia

Untuk memudahkan pembacaan, perjalanan pembaharuan dapat dipetakan ke dalam lima fase. Pembagian ini sejalan dengan kajian yang memandang pembaharuan sebagai satu masa tersendiri dalam sejarah pendidikan Islam. Pembagian ini bersifat analitis, sehingga batas antarfase tidak kaku dan beberapa ciri dapat berlangsung berdampingan. Ringkasan fase tersebut disajikan pada Tabel 1, kemudian diuraikan satu per satu.

***Tabel 1**. Periodisasi Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*

Fase	Ciri Utama	Bentuk Lembaga/Kebijakan
Tradisional	Pembelajaran berpusat pada kiai/guru; pengajaran kitab klasik; ikatan personal guru dan murid	Surau, langgar, masjid, pesantren
Kebangkitan awal abad ke-20	Pelembagaan gagasan pembaruan; sistem kelas dan jenjang; masuknya pelajaran umum; peran organisasi	Madrasah klasikal, sekolah organisasi, pesantren modern
Integrasi pascakemerdekaan	Negara mulai terlibat; pendidikan Islam diarahkan masuk sistem nasional	Kementerian Agama, perguruan tinggi Islam negeri
Penyetaraan masa Orde Baru	Penyetaraan madrasah dengan sekolah umum; perdebatan tentang identitas	Kebijakan bersama tiga menteri, penataan kurikulum madrasah
Reformasi dan era digital	Globalisasi, literasi digital, penguatan toleransi, penguatan landasan hukum	Madrasah dan pesantren berbasis teknologi, regulasi pesantren

1. Fase Tradisional

Fase tradisional ditandai oleh dominasi surau, pesantren, dan halaqah di masjid. Dhofier (2011) menggambarkan pesantren sebagai lembaga yang berpusat pada kiai, masjid, santri, asrama, dan pengajian kitab klasik. Ikatan antara guru dan murid bersifat personal dan berlangsung lama, sedangkan sanad keilmuan dipelihara dengan cermat. Pendidikan pada fase ini kuat dalam pembentukan akhlak, penguasaan teks, dan kedekatan spiritual, tetapi cenderung belum terstruktur dalam jenjang, penilaian, dan administrasi sebagaimana lazim pada sekolah modern. Kekuatan dan keterbatasan inilah yang kelak menjadi titik tolak perdebatan tentang apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu diubah.

2. Fase Kebangkitan Awal Abad ke-20

Memasuki awal abad ke-20, pembaruan bergerak dari tataran gagasan menuju pelembagaan.

Di Sumatra Barat, para ulama muda dan pegiat pendidikan membuka madrasah klasikal yang menata kelas, jenjang, dan materi pelajaran, serta memasukkan mata pelajaran umum di samping ilmu agama (Steenbrink, 1986). Di Jawa dan wilayah lain, organisasi kemasyarakatan Islam tampil sebagai penggerak. Muhammadiyah yang berdiri pada 1912 menjadikan pendidikan sebagai salah satu pilar gerakannya, dengan memadukan pelajaran agama dan pelajaran umum dalam sistem persekolahan. Organisasi lain seperti Al-Irsyad dan Persatuan Islam juga membangun jaringan sekolah dan tulisan yang memperkuat wacana pembaruan (Nata, 2019).

Pada kutub yang berbeda, kalangan pesantren tidak serta-merta menolak pembaruan, tetapi memilih jalan bertahap. Nahdlatul Ulama, yang berdiri pada 1926 di bawah kepemimpinan Hasyim Asy'ari, mempertahankan tradisi keilmuan pesantren sambil memasukkan unsur-unsur baru ke dalam kurikulum dan penyelenggaraan lembaga (Dhofier, 2011). Munawir dan Novita (2023) menyimpulkan bahwa NU menempuh modernisasi lewat pendirian ribuan lembaga pendidikan, terutama pesantren, yang pada perkembangan terkininya turut memanfaatkan perangkat pembelajaran digital. Di sisi lain, Pondok Modern Darussalam Gontor menempuh pembaruan melalui penataan pendidikan pesantren secara menyeluruh, termasuk sistem kelas, pembinaan bahasa, dan pengelolaan lembaga yang bertumpu pada wakaf bersama.

3. Fase Integrasi Pascakemerdekaan

Setelah kemerdekaan, negara mulai mengambil peran dalam pendidikan Islam. Pembentukan Kementerian Agama pada 1946 menempatkan urusan madrasah dan pendidikan agama dalam perhatian pemerintah. Perguruan tinggi Islam negeri dirintis pada awal 1950-an dan berkembang menjadi institut pada 1960, yang membuka jalur pendidikan tinggi bagi lulusan madrasah dan pesantren (Steenbrink, 1986). Fase ini ditandai oleh upaya mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Pembaharuan tidak lagi semata-mata prakarsa organisasi masyarakat, tetapi mulai bertemu dengan kebijakan publik.

4. Fase Penyetaraan pada Masa Orde Baru

Pada 1970-an, persoalan mutu dan pengakuan madrasah menjadi perhatian utama. Kebijakan bersama tiga menteri pada 1975 berupaya menyetarakan kedudukan madrasah dengan sekolah umum melalui pengaturan komposisi kurikulum, sehingga lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jalur umum (Steenbrink, 1986). Langkah tersebut memperluas kesempatan bagi peserta didik madrasah, tetapi sekaligus memunculkan perdebatan baru. Sebagian pengamat khawatir bahwa porsi pelajaran agama menyusut dan lembaga kehilangan kekhasannya, sedangkan pendukung kebijakan menilai penyetaraan perlu agar madrasah tidak terpinggirkan. Kegelisahan semacam ini

terus berulang dalam sejarah pembaruan dan memperlihatkan bahwa perubahan struktural selalu membawa konsekuensi bagi identitas lembaga (Azra, 2012).

Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa madrasah semakin diposisikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Ketentuan perundang-undangan pada akhir 1980-an hingga awal 2000-an mengukuhkan madrasah sebagai satuan pendidikan yang berciri khas Islam di dalam satu sistem nasional, dan pada tahun 2019 pesantren memperoleh pengaturan tersendiri melalui undang-undang. Pengakuan ini memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi lembaga-lembaga tersebut, meskipun implementasinya di tingkat daerah dan lembaga masih menuntut pengawalan.

5. Fase Reformasi dan Era Digital

Pada masa reformasi hingga kini, pendidikan Islam berhadapan dengan tantangan yang berbeda dari fase-fase sebelumnya. Globalisasi membuat arus informasi, nilai, dan model pendidikan bergerak lintas batas dengan cepat. Zaini (2021) menekankan bahwa pendidikan Islam di era globalisasi dituntut mampu menjawab perubahan sosial dan kemajuan teknologi tanpa tercerabut dari nilai dasarnya. Dalam kajian mereka tentang pembaruan, integrasi literasi digital, penguatan kemampuan berpikir kritis, perbaikan sarana prasarana, dan penguatan nilai toleransi disebut sebagai bagian dari pembaruan masa kini (Tarigan et al., 2024).

Di lapangan, tantangan ini diterjemahkan dalam berbagai bentuk. Madrasah dan pesantren mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi, memperkuat kemampuan bahasa asing dan sains, serta menata tata kelola agar lebih akuntabel. Mujahid (2023) menunjukkan bahwa pendidikan NU bergeser menuju model yang lebih inklusif dengan memasukkan aspek rasional dan sosiologis, termasuk perubahan pada metode, kurikulum, dan orientasi pendidikan pesantren. Temuan ini menguatkan gambaran bahwa pembaruan masa kini tidak lagi berupa pergantian besar yang tunggal, melainkan penyesuaian terus-menerus yang berlangsung di banyak lembaga dengan kecepatan dan gaya yang berbeda.

Tokoh dan Model Pembaruan

Pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dipahami tanpa menengok para tokoh yang menerjemahkan gagasan menjadi lembaga. Setiap tokoh membaca persoalan zamannya dengan cara masing-masing, sehingga menghasilkan model yang berbeda. Perbedaan itu sebaiknya dipandang sebagai kekayaan strategi, bukan semata-mata perselisihan. Tabel 2 meringkas beberapa model utama berdasarkan rangkuman literatur (Dhofier, 2011; Nata, 2019; Steenbrink, 1986).

***Tabel 2**. Tipologi Model Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*

Model Pembaharuan	Tokoh / Penggerak Utama	Karakteristik Kelembagaan & Kurikulum	Pendekatan terhadap Tradisi & Modernitas
Integratif-Organisatoris	K.H. Ahmad Dahlan (Muhammadiyah)	Pendirian sekolah formal berbasis kelas; memadukan materi agama dan kurikulum umum modern.	Mengadopsi sistem persekolahan modern Belanda secara terbuka demi emansipasi sosial umat.
Tradisionalis-Selektif	K.H. Hasyim Asy'ari (Nahdlatul Ulama)	Menjaga transmisi kitab kuning dan relasi kiai-santri; mengadopsi sistem madrasah secara bertahap.	Bertumpu pada kaidah memelihara tradisi lama yang baik dan menyerap inovasi baru yang lebih baik.
Modern-Sintesis Berasrama	Trimurti Pendiri (Pondok Modern Gontor)	Sistem Kulliyyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI), disiplin total 24 jam, penguasaan aktif bahasa Arab & Inggris.	Kemandirian kelembagaan bertumpu pada wakaf; menyintesiskan tradisi pesantren dan kurikulum modern.
Kultural-Transformasi Lokal	Ulama Muda Minangkabau (Sumatra Barat)	Transformasi surau tradisional menjadi madrasah berjenjang (Thawalib dan Diniyyah).	Rekonstruksi lokal adaptif tanpa memutus akar kebudayaan Minangkabau.
Metodologis-Didaktik	Mahmud Yunus	Standardisasi metode pengajaran bahasa Arab, penulisan buku ajar mandiri, dan penataan pendidikan guru agama.	Penguatan profesionalisme didaktik dan modernisasi pedagogi keislaman.

Model yang dibawa Ahmad Dahlan menunjukkan kecenderungan memadukan pelajaran agama dan pelajaran umum di dalam satu lembaga serta mengelolanya melalui organisasi, sehingga

pembaruan mudah direplikasi ke berbagai daerah. Model Hasyim Asy'ari menekankan kesinambungan tradisi keilmuan pesantren, dengan pembukaan terhadap unsur baru secara selektif. Model Gontor menekankan kemandirian kelembagaan, penguasaan bahasa, dan pembinaan karakter melalui kehidupan berasrama. Di Sumatra Barat, transformasi surau menjadi madrasah memperlihatkan bahwa lembaga lokal mampu beradaptasi tanpa kehilangan akar budayanya. Adapun tokoh yang berkecimpung dalam pendidikan guru dan penyusunan kurikulum, seperti Mahmud Yunus, memperkuat sisi metodologi pengajaran agama (Steenbrink, 1986).

Jika dibaca dengan kacamata sirah, keragaman model ini mencerminkan prinsip yang sama, yaitu keteguhan pada tujuan dengan kelenturan pada cara. Model-model tersebut berbeda dalam teknik dan kelembagaan, tetapi sama-sama berupaya menjaga pembentukan iman dan akhlak sebagai muara pendidikan. Karena itu, perbandingan antarmodel lebih bermanfaat bila diarahkan untuk mengambil pelajaran yang dapat saling melengkapi, bukan untuk menentukan satu model sebagai satu-satunya yang benar.

Dimensi-Dimensi Pembaruan

Berdasarkan telaah terhadap fase dan model di atas, pembaruan pendidikan Islam dapat dikelompokkan ke dalam enam dimensi yang saling berkaitan.

Dimensi pertama adalah tujuan pendidikan. Pada fase awal, tujuan pendidikan Islam dirumuskan terutama sebagai pewarisan ilmu agama dan pembentukan ulama. Pembaruan memperluas rumusan itu sehingga mencakup kesiapan lulusan untuk berperan di bidang sosial, ekonomi, dan kebangsaan tanpa menanggalkan tujuan spiritual (Nata, 2019). Perluasan tujuan ini penting karena seluruh dimensi lain bergantung padanya.

Dimensi kedua adalah kurikulum. Pembaruan kurikulum tampak dari masuknya mata pelajaran umum, bahasa asing, dan sains ke dalam lembaga yang semula hanya mengajarkan ilmu agama, serta dari upaya mengintegrasikan keduanya agar tidak menjadi dua kutub yang terpisah (Azra, 2012). Tantangannya adalah menghindari penumpukan mata pelajaran yang justru membebani peserta didik tanpa kedalaman.

Dimensi ketiga adalah metode pembelajaran. Metode hafalan, ceramah, dan sorogan-bandongan yang dominan pada fase tradisional mulai dilengkapi dengan diskusi, penugasan, praktik, dan pemanfaatan media. Perubahan ini sejalan dengan semangat sirah yang menghargai ragam cara mengajar selama tujuan terjaga. Di era digital, metode melebar ke pembelajaran daring dan campuran, yang menuntut kesiapan guru dan infrastruktur (Tarigan et al., 2024).

Dimensi keempat adalah kelembagaan. Perubahan dari pengajian informal menuju madrasah klasikal, sekolah Islam, dan perguruan tinggi merupakan wujud paling kasat mata dari pembaruan. Kelembagaan yang tertata memudahkan penjenjangan, penjaminan mutu, dan pengakuan oleh negara, tetapi bila berlebihan dapat mengikis keakraban relasi guru dan murid yang menjadi kekuatan tradisi lama (Dhofier, 2011).

Dimensi kelima adalah manajemen dan tata kelola. Lembaga yang berkembang membutuhkan perencanaan, pembiayaan, dan evaluasi yang rapi. Banyak pesantren dan madrasah kini mengadopsi manajemen modern, mulai dari pengelolaan keuangan hingga sistem informasi, sambil tetap memelihara kepemimpinan karismatik yang menjadi ciri khasnya (Munawir & Novita, 2023).

Dimensi keenam adalah pendidik. Pembaruan berhasil atau gagal sebagian besar ditentukan oleh kualitas guru dan kiai. Pendidik masa kini dituntut menguasai materi, metode, dan teknologi, sekaligus menjadi teladan akhlak. Sirah menegaskan bahwa keteladanan merupakan metode paling kuat; karena itu pembaruan yang hanya memperbarui perangkat tanpa membina pendidiknya akan kehilangan daya ungkit (Farid, 2018).

Tantangan dan Dilema Pembaruan

Meskipun capaian pembaruan cukup nyata, sejumlah tantangan masih mengemuka. Tantangan pertama adalah dualisme, yaitu keberadaan dua jalur yang berbeda ciri, sistem sekolah umum di satu sisi dan lembaga keagamaan di sisi lain. Dualisme ini sering menimbulkan kesenjangan mutu, anggaran, dan status sosial, serta membuat pendidikan agama dianggap terpisah dari ilmu pengetahuan (Azra, 2012; Steenbrink, 1986).

Tantangan kedua adalah dilema identitas. Setiap kali lembaga mengadopsi unsur baru, muncul pertanyaan tentang batas antara menyesuaikan diri dan kehilangan jati diri. Kekhawatiran ini nyata, sebagaimana tampak pada perdebatan seputar kebijakan penyetaraan madrasah. Pengalaman NU yang dipotret Munawir dan Novita (2023) serta Mujahid (2023) memperlihatkan bahwa dilema tersebut dapat diatasi bila perubahan dirumuskan secara sadar dan disertai penjelasan nilai yang dipertahankan, bukan dijalankan secara serampangan.

Tantangan ketiga adalah kesenjangan kesiapan. Tidak semua lembaga memiliki sumber daya yang sama untuk berbenah. Lembaga di wilayah perkotaan dengan dukungan dana yang memadai dapat bergerak cepat, sedangkan lembaga kecil di daerah terpencil menghadapi keterbatasan guru, sarana, dan akses teknologi. Kesenjangan ini berisiko memperlebar jarak mutu antarlembaga bila tidak diimbangi dengan kebijakan afirmasi dan jejaring dukungan (Tarigan et al., 2024).

Tantangan keempat adalah godaan pragmatisme. Dorongan untuk memenuhi tuntutan pasar kerja dan peringkat dapat menggeser fokus lembaga dari pembentukan manusia menuju sekadar penyiapan tenaga kerja. Di sinilah rujukan pada sirah berfungsi sebagai pengingat bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya mengejar kecakapan, tetapi juga kebijaksanaan dan akhlak (Al-Mubarakfuri, 2019).

Tantangan kelima menyangkut kepemimpinan dan keberlanjutan. Banyak lembaga pendidikan Islam tumbuh karena figur pendirinya yang kuat. Kekuatan ini menjadi modal besar pada masa awal, tetapi dapat menjadi titik rawan ketika terjadi pergantian generasi bila tidak disertai sistem yang baik. Lembaga yang berhasil melewati peralihan umumnya menyiapkan mekanisme kaderisasi, aturan tata kelola yang jelas, dan budaya musyawarah yang hidup (Dhofier, 2011). Pembaruan yang bergantung pada satu orang sulit bertahan lama, sedangkan pembaruan yang melembaga akan terus bergerak meskipun pemimpinnya berganti.

Rekonstruksi Paradigma Pembaruan Berbasis Sirah

Mengacu pada pembahasan di atas, artikel ini mengusulkan rekonstruksi paradigma pembaruan yang bertumpu pada prinsip-prinsip sirah. Prinsip-prinsip itu tidak dimaksudkan sebagai resep teknis, melainkan sebagai pedoman arah yang dapat diterjemahkan sesuai konteks masing-masing lembaga. Tabel 3 merangkum prinsip tersebut beserta implikasinya.

***Tabel 3**. Matriks Rekonstruksi Paradigma Pembaharuan Berbasis Nilai Sirah Nabawiyah*

Prinsip Nilai Sirah	Praktik Historis Masa Kenabian	Manifestasi dalam Pembaharuan Kontemporer
Berakar pada Wahyu	Perintah membaca wahyu pertama (QS al-‘Alaq [96]: 1–5); tauhid sebagai poros risalah.	Memastikan pembaruan teknologi dan kurikulum tetap berorientasi pada ketakwaan dan adab.
Keluwesan Metode	Variasi cara mengajar Nabi (dialog, analogi, kisah, tanya jawab reflektif sesuai karakter sahabat).	Mengadopsi metode pembelajaran aktif (active learning), hibrida, dan pemanfaatan media digital.

Prinsip Nilai Sirah	Praktik Historis Masa Kenabian	Manifestasi dalam Pembaharuan Kontemporer
Keteladanan Pendidik	Peran Nabi sebagai uswah hasanah; pembinaan integritas moral sahabat di Darul Arqam.	Penempatan guru/kiai sebagai model moral autentik di tengah krisis keteladanan era virtual.
Pusat Belajar Terbuka	Masjid Nabawi dan serambi Suffah sebagai sentra pendidikan, musyawarah, dan advokasi sosial.	Transformasi madrasah dan pesantren menjadi pusat literasi, pemberdayaan ekonomi, dan pengabdian masyarakat.
Keterbukaan Keahlian Luar	Pemanfaatan keterampilan baca-tulis tawanan Perang Badar untuk mengajar anak-anak Madinah.	Kemitraan strategis dengan institusi sains umum, industri teknologi, dan dunia usaha profesional.
Moderasi & Keadaban	Penegakan Piagam Madinah; pengakuan hak komunitas majemuk dan perlindungan martabat manusia.	Pengarusutamaan moderasi beragama (wasathiyyah) guna membendung radikalisme dan polarisasi.

Prinsip pertama, berakar pada wahyu, mengingatkan bahwa kebaruan tidak boleh memutus hubungan pendidikan dengan sumber nilainya. Prinsip ini menuntut lembaga untuk menjelaskan secara terbuka nilai inti yang dijaga, sehingga setiap kebijakan baru dapat diuji kesesuaiannya. Prinsip kedua, keluwesan metode, memberi ruang bagi inovasi pembelajaran, termasuk pemanfaatan teknologi, selama tujuan pendidikan tidak bergeser.

Prinsip ketiga, keteladanan pendidik, menempatkan pembinaan guru sebagai prioritas. Kebijakan pelatihan, kesejahteraan, dan budaya kerja perlu diarahkan agar guru tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga menjadi contoh dalam sikap. Prinsip keempat, pusat belajar yang terbuka bagi masyarakat, sejalan dengan fungsi masjid pada masa Nabi. Lembaga pendidikan Islam dapat memperluas perannya sebagai ruang literasi, pelayanan sosial, dan pemberdayaan warga, sehingga pembaruan dirasakan manfaatnya oleh lingkungan sekitar.

Prinsip kelima, keterbukaan terhadap keahlian dari luar, terinspirasi dari riwayat tentang

pemanfaatan keahlian baca-tulis para tawanan Badar. Prinsip ini mendukung kerja sama dengan pihak lain, termasuk lembaga pendidikan umum, perguruan tinggi, dan komunitas teknologi, untuk meningkatkan mutu. Prinsip keenam, moderasi dan keadaban, relevan dengan pesan penguatan toleransi yang ditekankan dalam kajian pembaruan mutakhir (Tarigan et al., 2024). Pendidikan yang mengajarkan keteguhan sekaligus kelapangan akan membantu peserta didik hidup damai dalam masyarakat majemuk.

Rekonstruksi ini sengaja dirumuskan pada tingkat prinsip agar tidak menjadi cetakan yang kaku. Setiap lembaga memiliki sejarah, sumber daya, dan kebutuhan yang berbeda, sehingga penerapannya perlu disertai evaluasi berkala. Hal yang dapat dijadikan ukuran adalah sejauh mana lembaga mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi, antara identitas dan keterbukaan, serta antara mutu akademik dan pembentukan karakter.

Implikasi Praktis bagi Lembaga Pendidikan Islam

Kerangka yang diuraikan di atas dapat diterjemahkan ke dalam langkah-langkah praktis bagi tiga jenis lembaga, yaitu pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam. Pembedaan ini diperlukan karena kebutuhan dan kapasitas ketiganya tidak sama, meskipun semuanya bernaung pada tujuan yang serupa.

Bagi pesantren, pembaruan sebaiknya dimulai dari penataan tata kelola tanpa menggeser peran kiai sebagai pengayom keilmuan dan keteladanan. Pesantren dapat menyusun dokumen yang menjelaskan nilai inti, tujuan pendidikan, dan struktur kurikulum, sehingga penambahan mata pelajaran umum atau keterampilan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai pelengkap yang telah dipertimbangkan. Pemanfaatan teknologi dapat dimulai dari hal yang sederhana, seperti pencatatan administrasi dan akses terhadap sumber belajar digital, kemudian berkembang bertahap sesuai kesiapan (Munawir & Novita, 2023). Pola bertahap ini sejalan dengan pengalaman pesantren yang menjaga tradisi sambil membuka diri terhadap unsur baru (Mujahid, 2023).

Bagi madrasah, tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara tuntutan kurikulum nasional dan kekhasan keislaman. Madrasah perlu memastikan bahwa nilai-nilai iman dan akhlak tidak hanya hadir pada mata pelajaran agama, tetapi juga terintegrasi dalam pembelajaran sains, bahasa, dan kegiatan pembiasaan di sekolah. Pembinaan guru melalui komunitas belajar, pendampingan sejawat, dan pelatihan berkelanjutan akan lebih berdampak daripada pelatihan sesaat yang tidak diikuti tindak lanjut. Madrasah juga dapat memperkuat hubungan dengan orang tua dan masyarakat sekitar sebagai wujud prinsip pusat belajar yang terbuka (Azra, 2012).

Bagi perguruan tinggi Islam, pembaruan menuntut penguatan integrasi keilmuan agar kajian keislaman dan ilmu pengetahuan lain saling memperkaya. Kurikulum dapat dirancang sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai teks, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai Islam pada isu-isu kontemporer, seperti literasi digital, etika teknologi, dan kewargaan. Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai penghasil pendidik dan peneliti, sehingga mutu pembinaannya akan memengaruhi seluruh jenjang di bawahnya. Kerja sama riset dengan madrasah dan pesantren dapat menjadi jembatan antara kajian akademik dan kebutuhan lapangan (Nata, 2019).

Ketiga jenis lembaga tersebut memiliki kebutuhan bersama, yaitu evaluasi yang jujur. Setiap program pembaruan perlu disertai indikator keberhasilan yang jelas, baik pada aspek akademik maupun pembentukan karakter. Evaluasi yang bersifat reflektif membantu lembaga mengenali bagian yang berhasil, bagian yang perlu diperbaiki, dan bagian yang sebaiknya dihentikan. Dengan demikian, pembaruan tidak menjadi rangkaian program yang bertambah tanpa arah, melainkan proses belajar kelembagaan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Masa pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia merupakan proses panjang yang dipicu oleh pertemuan antara gagasan pembaruan dari dunia Islam dan tekanan sistem pendidikan kolonial, lalu berlanjut melalui kebijakan negara dan prakarsa masyarakat. Perjalanan tersebut dapat dipetakan ke dalam lima fase, yaitu tradisional, kebangkitan awal abad ke-20, integrasi pascakemerdekaan, penyetaraan masa Orde Baru, dan transformasi era reformasi-digital. Pada setiap fase, pembaruan bergerak pada enam dimensi: tujuan, kurikulum, metode, kelembagaan, manajemen, dan pendidik.

Keragaman model yang diprakarsai para tokoh dan organisasi menunjukkan bahwa tidak ada satu jalan tunggal bagi pembaruan. Yang menyatukan berbagai model itu adalah upaya menjaga pembentukan iman dan akhlak sambil memperluas kecakapan peserta didik. Sirah nabawiyah memberikan prinsip yang membantu menjaga arah: berakar pada wahyu, luwes dalam metode, berpusat pada keteladanan, terbuka kepada masyarakat, mau belajar dari keahlian lain, dan mengedepankan moderasi.

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Pengelola lembaga perlu merumuskan nilai inti yang tidak boleh berubah sebelum menetapkan program pembaruan. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan afirmasi bagi lembaga yang terbatas sumber dayanya, terutama dalam pembinaan guru dan penyediaan akses teknologi. Bagi pengambil kebijakan di Kementerian Agama RI, disarankan untuk mengawal implementasi Undang-Undang Pesantren

Nomor 18 Tahun 2019 melalui afirmasi pendanaan sarana digital dan peningkatan kompetensi guru madrasah/pesantren di daerah 3T agar kesenjangan mutu pendidikan Islam tidak semakin melebar. Peneliti selanjutnya dianjurkan menguji kerangka konseptual ini melalui studi lapangan pada madrasah dan pesantren dengan karakteristik yang berbeda, agar prinsip-prinsip yang diusulkan dapat diperiksa penerapannya secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mubarakfuri, S. (2019). *Sirah Nabawiyah: Sejarah lengkap kehidupan Nabi Muhammad*. Qisthi Press.

Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Kencana.

Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia* (Edisi revisi). LP3ES.

Farid, A. (2018). *Sirah Nabawiyah*. Pustaka Yasir.

Ibnu Hazm al-Andalusi. (2018). *Intisari sirah nabawiyah: Kisah-kisah penting dalam kehidupan Nabi Muhammad*. Alvabet.

Mujahid. (2023). Transformation of Nahdlatul Ulama (NU) Islamic education: From a religious-conservative approach to a religious-rational-sociological concept in the modern era. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 191–196. https://doi.org/10.14421/jpi.2023.122.191-196

Munawir, & Novita, A. (2023). A century of Nadhlatul Ulama's contribution to modernizing Islamic education in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 11(1), 17–26. https://doi.org/10.15642/jpai.2023.11.1.17-26

Nasution, H. (1975). *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah pemikiran dan gerakan*. Bulan Bintang.

Nata, A. (2019). *Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia*. Prenada Media.

Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren, madrasah, sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun modern*. LP3ES.

Tarigan, M., Manurung, I., & Anugrah, N. (2024). Tinjauan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(3), 508–516. https://doi.org/10.47467/jdi.v6i3.2313

Yasmansyah, Y., Sukenti, D., Tambak, S., & Sabdin, M. (2021). Modernisasi pendidikan Islam awal abad ke-20: Pergulatan ilmiah akademik lembaga pendidikan di Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 6(2), 185–200. https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6(2).7809

Zaini, A. (2021). Islam dan piranti manusia modern di era digitalisasi: Rekonstruksi pendidikan Islam. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2), 221–234. https://doi.org/10.19105/tjpi.v16i2.4972